

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap warga negara akan melaksanakan usaha-usaha pembangunan terutama oleh negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia. Usaha-usaha pembangunan tersebut dilakukan dalam rangka mensejahterakan masyarakatnya, memperbaiki taraf hidup sehingga mendapatkan tempat di antara negara-negara yang ada di dunia serta dapat sejajar kedudukannya dengan negara-negara maju. Pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan yang bersifat ekonomi. Dimana pembangunan ekonomi dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup seluruh aspek dan kebijaksanaan yang komprehensif baik ekonomi maupun non-ekonomi. (Suryana, 2006 : 6)

Salah satu sasaran pembangunan ekonomi suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi. Pemerintah di negara manapun dapat jatuh atau bangun berdiri berdasarkan tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapainya dalam catatan statistik nasional. Berhasil atau tidaknya program-program pembangunan sering di nilai berdasarkan tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan, baik buruknya kualitas kebijakan pemerintah dan tinggi rendahnya mutu aparatnya di bidang ekonomi secara keseluruhan biasanya diukur berdasarkan kecepatan pertumbuhan ekonomi nasional yang dihasilkannya.

Dewasa ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami hambatan yang sangat besar untuk mempertahankan pertumbuhan tinggi seiring dengan krisis

keuangan global yang melanda seluruh dunia. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu masalah makro di Indonesia. Di dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN), dinyatakan secara eksplisit bahwa pembangunan ekonomi merupakan salah satu bagian penting dari pembangunan nasional dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa pembangunan ekonomi yang lebih serius dan terencana di Indonesia baru dimulai sejak pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama (REPELITA I) tahun 1969, dan prosesnya berjalan mulus sejak itu hingga krisis ekonomi menerjang Indonesia tahun 1997/1998 walaupun selama jangka waktu tahun tersebut Indonesia mengalami beberapa guncangan eksternal, seperti merosotnya harga minyak mentah di pasar internasional dan apresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS selama 1980-an.

Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu target yang sangat penting yang harus dicapai dalam proses pembangunan, karena pertumbuhan ekonomi dapat mengukur prestasi dari perkembangan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari GDP (*Gross Domestic Bruto*) dari suatu negara tersebut.

Tabel 1.1 di bawah ini merupakan tabel yang menggambarkan mengenai PDB (*Produk Domestik Bruto*) atas dasar harga konstan 2000. Laju pertumbuhan perekonomian Indonesia diukur berdasarkan PDB harga konstan.

Tabel 1.1
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1990 – 2009

Tahun	PDB Riil (Milyar Rupiah)	Tingkat Pertumbuhan (%)
1990	949,634	6.95
1991	1,015,634	6.95
1992	1,081,244	6.46
1993	1,151,524	6.50
1994	1,238,349	7.54
1995	1,340,142	8.22
1996	1,444,941	7.82
1997	1,512,853	4.7
1998	1,314,216	-13.13
1999	1,337,346	1.76
2000	1,389,770	3.92
2001	1,442,985	3.83
2002	1,506,124	4.38
2003	1,577,171	4.72
2004	1,656,517	5.03
2005	1,750,815	5.69
2006	1,847,127	5.5
2007	1,964,327	6.34
2008	2,082,104	5,99
2009	2,176,976	4,56

Sumber : Biro Pusat Statistik. Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Berbagai Edisi. BPS

Dimana dilihat dari perkembangannya laju pertumbuhan ekonomi mulai dari sebelum krisis moneter mengalami fluktuatif setiap tahunnya, hal ini dapat dilihat pada tahun 1990 dan 1991 nilai pertumbuhan sebesar 6,95% kemudian pada tahun 1992 mengalami penurunan menjadi sebesar 6,46%, pada tahun 1993 pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan sebesar 0,04% pada tahun 1993 menjadi 6,50% pada tahun 1994 kenaikannya sebesar 1,04% menjadi 7,54% dan

pada tahun 1995 walaupun mengalami kenaikan menjadi 8,22%, akan tetapi kenaikannya menurun menjadi sebesar 0,68% dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan kondisi politik dan ekonomi pada saat itu dalam keadaan yang stabil. Namun pada tahun 1996 sampai pada awal krisis 1997 pertumbuhan ekonomi turun sebesar 0,4% pada tahun 1996 menjadi sebesar 7,82% penurunan yang cukup tajam terjadi pada awal krisis moneter sebesar -3,12% pada tahun 1997 menjadi 4,7%, kemudian pada puncak krisis tepatnya tahun 1998 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar -13,13% hal ini dikarenakan terjadi krisis politik dan ekonomi. Krisis politik terjadi karena terjadi mosi tidak percaya dari seluruh masyarakat kepada Presiden Soeharto, karena presiden dianggap bertanggungjawab atas pembangun yang jalan ditempat dan kenaikan harga bahan pokok yang terus membengkak yang pada akhirnya mahasiswa yang mewakili masyarakat bertindak anarkis, krisis politik dan ekonomi dalam negeri diperpanjang dengan tindakan ekonom asal Israel yang bernama jos soro yang menciptakan krisis moneter di Asia yang menjadikan krisis permanen yang melumpuhkan seluruh aspek kehidupan di Indonesia. Kemudian selajutnya tahun 1999 setelah adanya pergantian kepemimpinan dari presiden Soeharto kepada wakil presiden BJ. Habibie pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan sebesar 1,76%, walaupun demikian tidak banyak memberi arti apa-apa. Perkembangan selanjutnya tahun 2000 pertumbuhan ekonomi mulai meningkat sebesar 3,92% angka tersebut bagus untuk langkah awal memperbaiki kondisi ekonomi. Tahun-tahun berikutnya perkembangan laju pertumbuhan ekonomi berfluktuasi.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia belum mampu menciptakan lapangan kerja dan menyerap tambahan angkatan kerja yang muncul sekitar 2,5 juta setiap tahun, akibatnya jumlah pengangguran meningkat, sebesar 9,76 juta orang tahun 2001–2004. Lambatnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya jumlah pengangguran yang mengakibatkan jumlah penduduk miskin belum dapat diturunkan setelah pasca krisis, tercatat bahwa tahun 2002 penduduk miskin sebesar 38,4 juta jiwa dimana angka ini lebih besar jika dibandingkan sebelum krisis, yaitu sebesar 34,5 juta jiwa pada tahun 1996 (BPS, 2002).

Permasalahan yang timbul adalah pertumbuhan ekonomi yang bergerak secara lambat dan berfluktuasi. Hal ini terjadi karena adanya ketimpangan pertumbuhan ekonomi. Menurut **Faisal Basri** dalam Lanscap Perekonomian Indonesia menyatakan bahwa. Yang dimaksud pertumbuhan ekonomi tidak seimbang adalah pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada perkembangan sektor-sektor jasa yang tidak dapat diperdagangkan secara internasional dengan leluasa disebut juga sektor *Non-tradable*. Sedangkan yang berkaitan dengan produksi dan dapat diperdagangkan secara internasional disebut **sektor Tradable**. Kesenjangan dua sektor inilah yang dikatakan pertumbuhan ekonomi yang timpang atau tidak seimbang. Sedangkan menurut Ikaputera Waspada memiliki definisi lain mengenai sektor tradable adalah kemampuan suatu negara untuk bersaing dengan negara lain yang kompetitif. Sebaliknya yang dimaksud dengan sektor non-tradable, yaitu kemampuan suatu negara yang tidak memiliki daya saing dengan negara lain baik barang dan jasa.

Gambaran kontras dapat kita saksikan pada tabel 1.2. Pada sektor *non-tradable* yang secara keseluruhan semua sektor tersebut tumbuh 2-3 kali lipat, dari data di atas menunjukkan pertumbuhan tercepat terjadi di subsektor yang padat teknologi dan yang paling minim penyerapan tenaga kerja. Lalu, mengapa pertumbuhan yang bertumpu pada sektor *non-tradable* itu buruk, khususnya bagi Indonesia? karena pola pertumbuhan yang bertumpu pada sektor jasa adalah negara maju yang sudah memiliki sarana dan prasarana yang lengkap, serta tingkat pendidikan maupun akses rata-rata penduduknya relatif merata. Sedangkan, jika hal tersebut terjadi di negara berkembang yang tingkat kesejahteraan dan rata-rata pendidikan rendah serta akses sumberdaya ekonomi yang tidak merata, maka pertumbuhan yang bertumpu pada sektor *non-tradable* akan berisiko? Mengapa demikian? karena secara umum sektor *non-tradable* lebih padat modal dan padat teknologi serta sangat sedikit menyerap tenaga kerja. Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi yang timpang sama buruk dan berbahaya dengan keleluasaan ekonomi berjangka panjang. Ini sangat kontras dengan sektor barang (*tradable*) yang ekspansinya terus mengalami penurunan. Ambil contoh subsektor pertanian. Para petani berteriak marah karena kelangkaan pupuk yang terus-menerus yang menjadi salah satu faktor kenaikan harga. Mayoritas nelayan tidak bisa menangkap ikan setelah kenaikan BBM yang terus menyengsarakan. Para pekerja, pegawai negeri dan guru semua menjerit karena upah riil mereka melorot dikikis inflasi. Seadanyainya sektor *tradable* tidak segera dibenahi, sehingga kondisinya kian terpuruk, maka gelombang pengangguran tak akan

terbendung dan jumlah penduduk miskin akan semakin melonjak naik dengan pesat seiring naiknya tingkan kelahiran. (Faisal Basri : 2009 : 44)

Tabel 1.2

Data Pertumbuhan Ekonomi (GDP) Per Sektor

Sektor	2005	2006	2007	Q1-2008	Q2-2008	Q3-2008
A. Tradable	3,5	3,7	3,8	3,4	3,2	3,2
Pertanian	2,5	3,0	3,5	6,0	4,6	2,4
Pertambangan	1,6	2,2	2,0	-2,3	-0,9	1,6
Manufaktur	4,6	4,6	4,7	4,3	4,1	4,3
B. Non- Tradable	8,0	7,4	9,0	9,5	10,1	9,5
Listrik, Gas dan Air	6,5	5,9	10,4	12,1	11,2	10,6
Konstruksi	7,3	9,0	8,6	8,3	8,0	7,5
Perniagaan, hotel dan Restoran	8,6	6,1	8,5	7,2	7,9	7,6
Transportasi dan komunikasi	13,0	13,6	4,4	19,7	19,6	17,1
Keuangan	7,1	5,7	8,0	8,3	8,7	8,5
Jasa-jasa umum	5,2	6,2	6,6	5,7	6,5	6,7
GDP	5,6	5,5	6,3	6,3	6,4	6,1

Sumber Diolah dari data-data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2000 sebagai "base year"

Ketimbangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia lebih parah jika dibandingkan dengan ketimpangan di Amerika Serikat. Alasannya sederhana: Amerika Serikat saja, yang memiliki perangkat-perangkat pendukung dan kelengkapan kelembagaan serta jaring-jaring pengaman yang cukup mantap, kerap menghadapi goncangan dan menghasilkan ketimpangan yang kian memprihatinkan. Apalagi Indonesia yang hanya meniru tanpa kelengkapan baik

dalam kelembagaan dan perasetase perangkat pendukung yang lemah yang pasti jika tidak diatasi ketimpangan akan berdampak sistemik tidak hanya berdampak ekonomi, melainkan juga politik dan ekonomi yakni kemiskinan yang kian tak teratasi, tingkat pengangguran semakin tinggi; sektor informal dalam perekonomian akan membesar ; kriminalitas akan meningkat dan korupsi kian tak teratasi serta ketimpangan sosial semakin tajam.

Tabel 1.3

Data Makroekonomi Indonesia

Indikator	Sebelum Krisis 1993-1996	Puncak krisis 1998	2001	2005	2006
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	7,7	-13,1	4,8	5,6	5,5
Tingkat pertumbuhan investasi	12,2	-33,0	6,7	10,8	2,9
persentase investasi terhadap GDP	28,0	25,4	21,4	23,6	24,0
Rata-rata Kurs (rupiah per US 1	2.210	10.013	9.332	9.705	9.141
Ekspor (miliar US\$)	43,0	48,8	72,1	85,7	100,7
Impor (miliar US\$)	36,0	27,3	43,3	57,7	61,0
Saldo perdagangan (miliar US\$)	7,0	21,5	28,7	28,0	39,6
Cadangan Internasional (miliar US\$)	13,8	22,9	34,3	34,7	42,6
Tingkat Inflasi	8,7	58,5	9,6	17,1	6,6
Tingkat Pengangguran	-	-	9,7	10,3	10,3
Tingkat kemiskinan	17,6	23,4	17,2	16,0	17,8

Sumber Departemen Keuangan dan World Bank, berbagai edisi

Investasi adalah mobilisasi sumberdaya untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi atau pendapatan di masa mendatang. Dalam

investasi ada dua tujuan yang ingin dicapai yaitu mengganti bagian penyediaan modal yang rusak dan tambahan modal yang ada. **(Novita Linda Sitompul : 24).**

Dalam teori ekonomi makro, dari sisi pengeluaran, pendapatan domestik bruto adalah penjumlahan dari berbagai variabel termasuk di dalamnya adalah investasi. Ada beberapa hal yang sebenarnya berpengaruh dalam soal investasi ini. Investasi sendiri dipengaruhi oleh investasi asing dan domestik. Investasi yang terjadi terdiri dari investasi pemerintah dan investasi swasta dapat berasal dari investasi pemerintah dan investasi swasta. Investasi dari sektor swasta dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri (asing). Investasi pemerintah dilakukan guna menyediakan barang publik. Besarnya investasi pemerintah dapat dihitung dari selisih antara total anggaran pemerintah dengan belanja rutinnya.

Investasi langsung asing sering dianggap sebagai katalis penting bagi pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. Hal ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan merangsang pertumbuhan investasi domestik, peningkatan modal pembentukan manusia dan dengan memfasilitasi transfer teknologi di negara-negara tersebut. Hal tersebut bisa terjadi jika penanam modal asing lebih banyak menginvestasikan modalnya dalam sektor riil contohnya seperti membangun jalan raya, pabrik dan gedung serta teknologi produksi lainnya. Namun jika penanam modal asing atau yang di kenal dengan sebutan investor banyak menanamkan modalnya di pasar uang dalam bentuk saham, investasi tidak akan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Tabel 1.4
Perkembangan PMA Periode 1990-2009

Tahun	Jumlah Proyek	Nilai PMA (Dalam US\$ / miliar)	Perubahan (Dalam US\$ / miliar)	Pertumbuhan (%)
1990	100	706	0	0
1991	149	1.059,70	353,7	50,09
1992	155	1.940,90	881,2	83,16
1993	183	5.653,10	3712,2	191,26
1994	392	3.771,20	-1881,9	-33,29
1995	287	6.698,40	2927,2	77,62
1996	357	4.628,20	-2070,2	-30,91
1997	331	3.473,40	-1154,8	-24,95
1998	412	4.865,70	1392,3	40,08
1999	504	8.229,90	3364,2	69,14
2000	638	9.877,40	1647,5	20,02
2001	454	3.509,40	-6368	-64,47
2002	442	3.082,60	-426,8	-12,16
2003	569	5.445,30	2362,7	76,65
2004	548	4.572,70	-872,6	-16,02
2005	907	8.911,00	4338,3	94,87
2006	869	5.991,70	-2919,3	-32,76
2007	982	10.341,40	4349,7	72,60
2008	1.138	14.871,40	4530	43,80
2009	1.221	10.815,20	-4056,2	-27,28
Jumlah	10638	118444,6	10109,2	577,46
Rata-rata	531,9	5922,23	505,46	28,87

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), BPS diolah

Dari tahun 1991 sampai tahun 1993 mengalami pertumbuhan investasi yang cukup baik rata-rata sebesar 108,17%. Selanjutnya pada tahun 1994 pertumbuhan investasi negatif sebesar -33,29%, pada tahun 1995 pertumbuhan investasi naik sebesar 77,62%. Pada tahun 1996 sampai tahun 1997 mengalami pertumbuhan negatif sebesar -30,91 % dan -24,95%. Pada tahun 1998 walaupun

dilanda krisis ekonomi pertumbuhan investasi positif sebesar 40,08%. Pada tahun 2001 pertumbuhan investasi negatif terbesar -64,76% hal ini terjadi karena pada tahun tersebut kondisi sosial dan politik mencekam ini terjadi adanya teror dan pemboman di daerah Bali. Yang membuat pertumbuhan negatif adalah adanya larangan dari negara maju seperti Amerika, Australia dan negara lainya agar para warganya tidak datang dan berkunjung ke Indonesia untuk berwisata hal ini justru berdampak terhadap penurunan pertumbuhan PMA. Pada tahun 2002 pertumbuhan PMA masih negatif sebesar -12,16% karena dampak dari bom Bali 1, pada tahun 2003 pertumbuhan PMA kembali naik menjadi sebesar 76,65% karena pada saat itu keadaan politik dan keamanan ada dalam keadaan stabil. Pada tahun-tahun selanjutnya pertumbuhan berfluktuatif.

Pada tabel 1.5 menunjukkan pertumbuhan investasi domestik berfluktuasi pada 1991 pertumbuhan investasi domestik sebesar 52,84%, kemudian pada tahun 1992 mengalami penurunan menjadi 38,22%. Pada tahun 1993 mengalami kenaikan sebesar 63,51%, kemudian pada 1994 dan 1995 mengalami penurunan sebesar 54,32% dan -11,53%. Pada tahun 1996 pertumbuhan investasi domestik mengalami kenaikan sebesar 64,50%. Pada masa krisis moneter pertumbuhan investasi domestik mengalami penurunan kembali bahkan negatif tahun 1997 sebesar -0,10% dan pada tahun 1998 pertumbuhan investasi domestik -11,53%. Pada tahun 1999 pertumbuhan investasi domestik kembali mencatat positif sebesar 1,37%.

Tabel 1.5
Perkembangan PMDN Periode 1990-2009

Tahun	Jumlah Proyek	Nilai PMDN (Dalam US\$ / miliar)	Perubahan (Dalam US\$ / miliar)	Pertumbuhan (%)
1990	253	2.398,6	0	0
1991	265	3.666,1	1.267,5	52,84
1992	225	5.067,4	1.401,3	38,22
1993	304	8.286,0	3.218,6	63,51
1994	582	12.786,9	4.500,9	54,32
1995	375	11.312,5	-1.474,4	-11,53
1996	450	18.609,7	7.297,2	64,50
1997	345	18.628,8	19,1	0,10
1998	296	16.512,5	-2.116,3	-11,36
1999	248	16.286,7	-225,8	1,37
2000	300	22.038,0	5.751,3	35,31
2001	160	9.890,8	-12.147,2	-55,12
2002	108	12.500,0	2.609,2	26,38
2003	120	12.247,0	-253,0	-2,024
2004	130	15.409,4	3.162,4	25,82
2005	215	30.724,2	15.314,8	99,39
2006	162	20.649,0	-10.075,2	-32,79
2007	159	34.878,8	14.229,8	68,91
2008	239	20.649,0	-14.229,8	-40,80
2009	248	37.799,8	17.150,8	83,06
Jumlah	5184	330.341,2	35.401,2	201,57
Rata-rata	259,2	16517,06	1.770,1	10,08

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), BPS diolah

Pada tahun 2000 mengalami kenaikan sebesar 35,31% pada tahun 2001 pertumbuhan investasi domestik mengalami penurunan, bahkan sampai negatif sebesar -55,12% karena kondisi politik dan keamanan yang mencekam menyebabkan para investor enggan untuk berinvestasi. Pada tahun 2002 pertumbuhan investasi domestik mencatat angka positif sebesar 26,38%,

kemudian pada tahun 2003 investasi domestik mengalami penurunan menjadi sebesar -2,024% hal ini dikarenakan kondisi ekonomi yang tak stabil pada tahun 2004 dan 2005 investasi domestik mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 25,82% dan 99,39% pada tahun 2006 pertumbuhan investasi domestik mengalami penurunan menjadi sebesar -32,79% ini merupakan dampak dari pemerintah yang mengeluarkan kebijakan menaikkan harga BBM dan konversi minyak tanah ke gas pada tahun 2007 pertumbuhan investasi domestik mengalami kenaikan menjadi sebesar 68,91% hal ini terjadi karena pemerintah dapat menjaga inflasi melalui operasi pasar agar harga-harga bahan pokok stabil. Pada tahun 2008 pertumbuhan investasi domestik turun menjadi sebesar -40,80% ini merupakan dampak dari krisis finansial di Amerika Serikat, investor asing asal Amerika Serikat menarik sahamnya kembali ke Amerika Serikat dan menurunnya ekspor Indonesia ke Amerika Serikat menyebabkan investor berekspansi negatif. Namun setelah pemerintah yang diwakili oleh Gubernur Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan moneter dan pidato mengenai kondisi perekonomian Indonesia investor kembali percaya dan iklim investasi kembali naik menjadi sebesar 83,06% pada tahun 2009.

Mengapa penurunan investasi atau investasi berfluktuasi sangat serius? Jika investasi turun, maka kegiatan-kegiatan produksi secara nasional pun akan ikut turun (sejauh mana dampaknya, tentu bervariasi tergantung pada sektornya). Jika kegiatan produksi turun, dengan sendirinya output pun merosot, dan jika output nasional terus-menerus turun, maka pada gilirannya laju pertumbuhan

ekonomi secara keseluruhan juga akan merosot, baik dalam angka maupun persentase pertumbuhannya sendiri.

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*) dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas, dimana pertumbuhan produktivitas tersebut pada gilirannya merupakan motor penggerak pertumbuhan (*engine of growth*).

Dalam teori *economic growth*, sumber-sumber pertumbuhan ekonomi-*sources of growth* – berasal dari kemampuan suatu negara dalam mengembangkan potensi sumberdayanya. Makin besar kuantitas dan makin tinggi kualitas sumberdaya tersebut, maka makin besar pula potensi suatu negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Faktor yang penting dalam sumber-sumber pertumbuhan adalah; *natural resources*, *capital*, *saving*, dan perkembangan teknologi. Kekayaan *natural resources* akan sangat membantu perekonomian suatu negara, walaupun belum cukup bila tidak didukung oleh skill penduduk untuk mengeksplorasi *natural resources*. Baik *capital* dan *saving* juga merupakan faktor produksi sebagai unsur dominan untuk pertumbuhan ekonomi dimasa yang akan datang. Demikian pula, perkembangan teknologi dapat diterima secara luas sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan bahwa teknologi memungkinkan bagi produsen untuk memproduksi lebih banyak dengan tingkat input yang sama. Perkembangan teknologi bergantung pada kemampuan ilmu pengetahuan dan kualitas pendidikan suatu negara serta seberapa besar perhatiannya pada penelitian dan pengembangan. (Sanjoyo : 2001: 1)

Menurut **Todaro** (1994:21) Pembangunan manusia merupakan salah satu perbaikan yang berkesinambungan atas suatu sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik atau manusiawi.

Kenyataannya dapat dilihat bahwa dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang diperlihatkan oleh meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Peningkatan pengetahuan dan keahlian akan mendorong peningkatan produktivitas kerja seseorang. Perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan mempekerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang lebih tinggi, sehingga perusahaan akan bersedia memberikan upah atau gaji yang lebih tinggi kepada yang bersangkutan. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang dapat diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya. Rendahnya produktivitas tenaga kerja kaum miskin dapat disebabkan oleh karena rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan.

Selain investasi, maka tenaga kerja merupakan suatu faktor yang mempengaruhi output nasional. Angkatan kerja yang besar akan terbentuk dari jumlah penduduk yang besar. Namun pertumbuhan penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang buruk terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut **Todaro** (2000) pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong timbulnya masalah keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan menjadi semakin jauh. Selanjutnya dikatakan bahwa masalah kependudukan yang timbul bukan karena banyaknya jumlah anggota keluarga, melainkan karena mereka terkonsentrasi

pada daerah perkotaan saja sebagai akibat dari cepatnya laju migrasi dari desa ke kota. Namun demikian jumlah penduduk yang cukup dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan memiliki skill akan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Dari jumlah penduduk usia produktif yang besar, maka akan mampu meningkatkan jumlah angkatan kerja yang tersedia dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan produksi output nasional.

Dari data tabel 1,6 diatas menunjukkan bahwa angkatan kerja selama dua puluh tahun mengalami peningkatan. Namun jika dilihat dari data angkatan kerja yang bekerja dapat terlihat cenderung berfluktuasi. Kemudian jika dilihat dari TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja) menunjukkan angka yang berfluktuasi, dari tahun 1990-2009 rata-rata TPAK hanya mencapai 66,3%. Hal ini mengindikasikan bahwa TPAK masih kecil karena belum mendekati 100%. Dan menunjukkan 33,69% penduduk usia kerja yang belum bekerja. Dengan demikian menunjukkan masih tingginya tingkat pengangguran dan rendahnya tingkat produksi nasional di Indonesia.

Kondisi ini di perparah dengan rendahnya produktivias tenaga kerja. Hal ini dapat terjadi karena rendahnya pendidikan yang diperoleh tenaga kerja, sehingga para tenaga kerja tidak memiliki keahlian dan keterampilan yang memadai. Akibat rendahnya produktivitas, maka tenaga kerja akan mendapatkan upah yang rendah. Menurut pengamat ekonomi Hendri Saparini dari UGM, menjelaskan bahwa Indonesia memiki tingkat upah yang rendah di bandingkan negara-negara berkembang lain dan kesejahteraan yang buruk. Banyak dari rakyat yang menajdi buruh di negeri sendiri (**diskusi di Metro Pagi 11 oktober 2010**)

Tabel 1.6**Perkembangan Penduduk Usia Kerja di Indonesia Periode 1990-2009**

Tahun	Angkatan Kerja (Ribuan Orang)	Angkatan Kerja yang bekerja (Ribuan Orang)	TPAK (%)
1990	77,820.00	75,851.00	57,3
1991	78,456.00	76,423.00	57,1
1992	80,704.00	76,423.00	57,3
1993	81,446.00	78,518.00	56,6
1994	85,777.00	82,039.00	58,0
1995	86,361.00	80,110.00	56,6
1996	90,110.00	85,702.00	66,9
1997	91,325.00	87,050.00	66,3
1998	92,375.00	87,672.00	66,91
1999	94,847.00	88,817.00	67,22
2000	95,651.00	89,838.00	67,76
2001	98,812.00	90,807.00	68,02
2002	100,779.00	91,647.00	67,76
2003	100,316.00	90,785.00	67,86
2004	103,973.00	93,722.00	67,54
2005	105,802.00	94,948.00	68,02
2006	106,389.00	95,457.00	66,16
2007	109,942.00	99,931.00	66,99
2008	111,947.00	102,553.00	67,18
2009	113,744.00	104,485.00	67,60

Sumber : Biro Pusat Statistik. Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Berbagai

Edisi. BPS'

Dalam literatur ekonomi, pentingnya teknologi untuk pertumbuhan ekonomi telah disadari sejak lama. Hampir semua aliran pemikir ekonomi Neoklasik, Keynesian, Marxis dan Schumpeteri menerima fakta bahwa pertumbuhan produktivitas sangat banyak tergantung pada pengenalan dan difusi produk serta proses baru yang lebih efisien dalam sistem ekonomi. Berdasarkan survei intensif yang meliputi tiga perempat populasi dan pangsa pasar dunia, dikemukakan bahwa mesin utama pertumbuhan ekonomi adalah kemajuan pengetahuan dan teknik yang diinvestasikan dalam sumberdaya manusia dan barang modal (**Joko Susanto** : 2000)

Dari paparan di atas penulis merasa tertarik untuk mengkaji sejauh mana pengaruh realisasi Penanaman Modal Asing (PMA), realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), *Human Capital*, Tenaga kerja dan kemajuan teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 1990-2009. Dengan demikian, maka penulis mengambil judul **“PENGARUH INVESTASI, TENAGA KERJA DAN KEMAJUAN TEKNOLOGI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA PERIODE 1990-2009”**

2.1 Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan yang menarik untuk diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh penanaman modal asing (PMA) terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?
2. Bagaimanakah pengaruh penanaman modal dalam negeri (PMDN) terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?

3. Bagaimanakah pengaruh investasi sumberdaya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?
4. Bagaimanakah pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?
5. Bagaimanakah pengaruh kemajuan teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?
6. Bagaimanakah pengaruh investasi, tenaga kerja dan kemajuan teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh penanaman modal asing (PMA) terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia
2. Untuk mengetahui pengaruh penanaman modal dalam negeri (PMDN) terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia
3. Untuk mengetahui pengaruh investasi sumberdaya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia
4. Untuk mengetahui pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia
5. Untuk mengetahui pengaruh Kemajuan Teknologi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia
6. Untuk mengetahui pengaruh investasi, tenaga kerja dan kemajuan teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai informasi tambahan bagi para *civitas akademik* dan masyarakat untuk mengetahui seberapa besar pengaruh investasi, tenaga kerja dan kemajuan teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
2. Memberikan sumbangan terhadap pemikiran dan perkembangan ilmu ekonomi khususnya masalah pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
3. Memberikan sumbangan pemikiran kepada pemangku kebijakan dalam hal ini pemerintah, agar kebijakan yang dilakukan dapat mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat.

1.5 Sistematika Penulisan

Pembahasan penelitian ini terbagi menjadi lima bab. Adapun garis besar pembahasan masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Berisi landasan teori yang mencakup masing-masing komponen dari pertumbuhan ekonomi, investasi, tenaga kerja dan kemajuan teknologi.

Bab III Metode Penelitian

Berisi jenis penelitian, data dan sumber data, definisi operasional variabel, metode analisis data dan metode pengumpulan data.

BAB IV Analisa Data dan Pembahasan

Bab ini dilakukan metode analisis data, yang berupa penjabaran angka-angka yang telah dikumpulkan untuk membuktikan rumusan masalah pada bab sebelumnya, dan pembahasan atas hasil analisis data.

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari masalah yang diteliti, keterbatasan penelitian, serta saran-saran kepada penelitian selanjutnya dan pihak Pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi dalam upaya meningkatkan pembanguna dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

